

ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI STERILISASI TEPIAN MAHAKAM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SAMARINDA

Siti Khoirul Naima ¹, Sri Murlianti ²

Abstrak

Kebijakan Sterilisasi Kawasan Tepian Mahakam Tepian Mahakam oleh Pemerintah Kota Samarinda bertujuan mengembalikan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ketertiban kota. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak ganda yang signifikan. Penelitian kualitatif deskriptif di Jalan Gajah Mada ini menganalisis dampak sosial ekonomi serta strategi adaptasi PKL pasca sterilisasi melalui wawancara mendalam dengan 14 informan (Komunitas IPTM, PKL, dan Satpol PP). Secara ekonomi terjadi penurunan pendapatan drastis, ketidakstabilan penghasilan, dan pengikisan aset simpanan. Secara sosial terjadi perenggangan interaksi antar pedagang akibat keterpencaran lokasi serta munculnya pengelompokan sosial baru. Meskipun kebijakan ini berhasil meningkatkan estetika dan ketertiban kota, terdapat kesenjangan dengan kondisi riil PKL yang membutuhkan solusi ekonomi alternatif serta pemberdayaan yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: *Dampak_Sosial_Ekonomi, Kebijakan_Sterilisasi_Sungai, Pedagang_Kaki_Lima*

Pendahuluan

Menurut (Sethuraman, S. V., 1991), pasca krisis ekonomi tahun 1998, sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL) menjadi katup penyelamat bagi masyarakat perkotaan kelas menengah ke bawah. Di Kota Samarinda, keindahan bantaran Sungai Mahakam dimanfaatkan oleh para PKL sebagai tempat berjualan berbagai kuliner hingga menjadi daya tarik wisata yang masif. Namun, penggunaan ruang publik ini memicu dampak negatif, seperti masalah kemacetan, kota tampak kurang tertata, dan problem sampah yang berserakan.

Masifnya aktivitas pedagang kaki lima di Kawasan Tepian Mahakam kian meresahkan akibat maraknya parkir liar, pungutan liar (premanisme), kerusakan fasilitas umum, dan kemacetan parah di jalan utama. Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Kebijakan Sterilisasi Kawasan Tepian Mahakam terhadap pedagang kaki lima di Kota Samarinda menjadi Ruang Terbuka

¹ Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: naimachan117@gmail.com

² Dosen Pembimbing, Dosen Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Hijau. Kebijakan Sterilisasi Tepian Mahakam melalui Surat Nomor 660/2916/012.02 Tentang Penutupan Usaha yang Beraktifitas Di sepanjang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalan Gajah Mada pada 19 September 2022. Meski bertujuan positif untuk penataan kota, penertiban tanpa penyediaan ruang relokasi resmi ini memaksa pedagang mandiri secara sepihak dan menimbulkan dampak yang cenderung dominan negatif terhadap keberlanjutan sosial serta ekonomi para PKL.

Kerangka Dasar Teori Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan perbandingan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian Saputra dan Gunawan mengenai Analisis Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Kota Sigli Kabupaten Pidie (Saputra & Gunawan, 2019). Kedua, penelitian oleh Haki dan Komarudin mengenai Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Stadion Maulana Yusuf Ciceri Kota Serang (Haki & Komarudin, 2022). Ketiga, penelitian oleh Pratiwi mengenai Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Malioboro Terhadap Pedagang Kaki Lima (Pratiwi et al., 2022). Keempat, penelitian oleh Hariyani mengenai Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Mempertahankan Usaha Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi pada PKL di Lapangan Desa Karangrejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri) (Hariyani, 2021). Kelima, penelitian oleh Mardliyah mengenai Penggunaan Ruang Publik Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong (Studi Pada Area Toko Thio di Kelurahan Remu Utara) (Mardliyah et al., 2021). Keenam, penelitian oleh Fayyadi dan Nefianto mengenai Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang (Fayyadi & Nefianto, 2019). Ketujuh, penelitian oleh Septian mengenai Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta (Septian, 2022).

Kedelapan, penelitian oleh Aotama dan Klavert mengenai Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon (Aotama & Klavert, 2021). Kesembilan, penelitian oleh Beni dan Atlantika mengenai Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Bengkayang. Control of Food Traders in Bengkayang Market (Beni & Atlantika, 2022). Kesepuluh, penelitian oleh Murlianti et al. 2024 mengenai Rekonfigurasi Sosial dan Marginalisasi Petani di Desa Transmigrasi dalam Konteks Industrialisasi Batu Bara di Tenggara Seberang, Kalimantan Timur (Murlianti et al., 2024). Kesebelas, penelitian oleh Murlianti et al. 2022 mengenai Evaluasi Kesejahteraan Pekerja Borongan di Perkebunan Kelapa Sawit di Kutai Barat, Kalimantan Timur (Murlianti et al., 2022). Kedua belas, penelitian oleh Murlianti dan Mulyani mengenai Kebijakan yang Hilang di Lapangan: Studi Kritis mengenai Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi dalam Program Penanganan Stunting (Murlianti & Mulyani, 2026). Ketiga belas, penelitian oleh Murlianti et al. 2025 mengenai Dari Lahan

Komunal ke Garis Depan Korporasi: Agribisnis Ekstraktif dan Pergeseran Budaya Masyarakat Dayak Kenyah (Murlianti et al., 2025).

Meskipun penertiban PKL banyak diteliti, penelitian ini berfokus pada kondisi sosial ekonomi pra dan pasca penertiban di Tepian Sungai Mahakam Samarinda yang unik karena adanya ambiguitas kebijakan. Kebijakan sterilisasi demi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini dinilai bias karena hanya menggusur PKL kecil, sementara bangunan besar seperti mall, kafe, dan hotel di bantaran sungai tetap dibiarkan berdiri. Selain itu, praktik pungutan liar dan premanisme nyatanya masih terjadi pasca sterilisasi, di tengah adanya regulasi pemerintah daerah yang memprioritaskan pedagang lokal asli berdasarkan kepemilikan KTP Samarinda.

Dampak Sosial

Dampak sosial adalah adanya suatu pengaruh atau akibat yang terjadi pada masyarakat baik karena suatu kejadian yang mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya di dalam masyarakat karena hal-hal tertentu (Fardani. 2012:6). Dalam konteks pedagang kaki lima (PKL), dampak sosial ini termanifestasi ke dalam beberapa dimensi berikut:

- a. *Hubungan Sosial PKL*: Menurut (Farrah, 2021) hubungan sosial adalah suatu kegiatan yang terjadi baik individu, individu dengan kelompok, antar kelompok, untuk mengkoneksikan kepentingan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan terbentuknya rasa saling pengertian, dan kerjasama yang menguntungkan.
- b. *Struktur Sosial*: Menurut (Soerjono Soekanto dalam Olivia Sabat dari Detikedu, 2021) struktur sosial adalah hubungan timbal balik yang di dalamnya ada posisi-posisi sosial serta peranan-peranan sosial yang dimiliki baik individu maupun kelompok dalam struktur tersebut.
- c. *Perilaku Sosial*: Menurut (Hasan Langgulung, 1980) perilaku sosial adalah segala aktivitas terhadap lingkungan sosialnya baik individu terhadap individu lainnya maupun individu terhadap kelompok yang dapat diamati.
- d. *Kelas Sosial PKL*: Menurut Teori Kompromi (Max Weber dalam Ade Heryana, 2020), kelas sosial atau disebut juga stratifikasi sosial yakni pengelompokan sosial yang tidak diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada keadaan miskin dan kaya. Kelas sosial ditentukan pada dimensi yang lebih beragam terkait ekonomi, kelompok status, pendidikan, keterampilan, kehormatan individu, dan politik atau kekuasaan.
- e. *Komunitas*: Menurut (Barbara A. Israel, et.al dalam Firman, 2021) menyebutkan bahwa komunitas itu diartikan sebagai persamaan perasaan yang terhubung antar individu dengan norma, nilai, dan minat yang sama dalam memenuhi tujuan yang sama.
- f. *Nilai-nilai Budaya*: Kebiasaan kelompok membentuk standar nilai yang memengaruhi seluruh aktivitas harian PKL, termasuk pola tidur, gaya hidup, dan cara berinteraksi.

Dampak Ekonomi

Menurut (Cohen dalam Dwi, 2015: 21), dampak ekonomi adalah pengaruh akibat suatu perubahan lingkungan yang menimbulkan pergeseran dalam kegiatan perekonomian, yang secara spesifik mencakup perubahan pada aspek pendapatan, aktivitas ekonomi, dan pengeluaran. Dalam konteks pedagang kaki lima (PKL), dampak ekonomi ini termanifestasikan ke dalam beberapa dimensi berikut:

- a. *Tingkat Pendapatan*: Menurut (Kusnadi, 2009:9), pendapatan adalah penambahan yang aktiva yang dapat mengakibatkan bertambahnya modal dihasilkan dari penjualan barang dan/ atau atas jasa yang sudah diberikan terhadap pihak lain.
- b. *Pemenuhan Kebutuhan Hidup*: Sebelum sterilisasi, pendapatan PKL hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan primer (pangan, sandang, papan), tanpa mampu menjangkau kebutuhan sekunder dan tersier. Pasca sterilisasi, kemerosotan pendapatan mengancam kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan primer, sehingga kualitas hidupnya menurun.
- c. *Kepemilikan Simpanan dan Aset*: Dikutip dari redaksi OCBC NISP, tabungan adalah bentuk simpanan yang tidak digunakan maupun dialokasikan khusus dari pendapatan. Tabungan tidak hanya berupa uang, tetapi dapat berupa bentuk lain seperti emas.
- d. *Investasi dan Asuransi*: Menurut (Kholida, 2022) investasi adalah penanaman modal berupa aset berharga untuk suatu keuntungan di masa mendatang bagi para investor (pihak yang melakukan investasi).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan bentuk studi kasus untuk membedah secara mendalam kondisi sosial ekonomi para pedagang kaki lima (PKL) serta menyoroti fenomena ambiguitas kebijakan tata ruang yang terjadi di di Kawasan Tepian Sungai Mahakam, Kota Samarinda. Secara spesifik di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu. Lokasi ini dipilih karena adanya kontras antara sterilisasi lahan hijau dengan bertahannya bangunan komersial besar di bantaran sungai secara ekologis.

Melalui teknik *purposive sampling*, penelitian ini melibatkan 14 orang informan yang diwawancarai, terdiri dari 12 PKL terdampak sterilisasi, 1 orang pimpinan komunitas pedagang (Ikatan Pedagang Tepian Mahakam/IPTM) termasuk juga PKL terdampak, dan 1 orang pemangku kebijakan dan pengawas lapangan (Satpol PP Kota Samarinda). Fokus penelitian ini yaitu dinamika dampak sosial dan ekonomi PKL sebelum dan pasca sterilisasi, serta adaptasi dan strategi bertahan PKL.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Respon dan Pengalaman PKL Terhadap Kebijakan

1.1 Pengetahuan Terhadap Kebijakan

Mayoritas informan 11 dari 13 PKL mengetahui kebijakan sterilisasi Kawasan Tepian Mahakam melalui papan larangan, edaran resmi, informasi dari petugas, maupun sesama pedagang. Namun, tingkat pemahaman bersifat variatif. Sebagian hanya mengetahui secara umum tanpa mendetail aturan, sehingga pengetahuan yang dimiliki cenderung parsial dan tidak sepenuhnya berbasis pada sosialisasi formal pemerintah. Akibatnya, banyak PKL merasa kebijakan tersebut bersifat tiba-tiba dan tidak memberikan kejelasan bagi keberlangsungan usaha mereka.

1.2 Strategi PKL Saat Penertiban

Para pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Tepian Mahakam, Samarinda, merespons tindakan penertiban dengan berbagai strategi bertahan hidup (*survival*) yang adaptif namun bersifat jangka pendek.

Tabel 1.1 Strategi Awal Bertahan PKL dari Penertiban

Model Strategi	Informan	Keterangan
Berdagang di waktu tertentu	2 orang (Bapak O dan Bapak MSF)	- Berdagang di luar jam operasi aparat
Pindah lokasi mandiri	7 orang (Bapak DY, Bapak AP, Ibu JH, Ibu KS, Bapak MSF, Ibu SH, Bapak H)	- Berkeliling tidak tentu - Pindah di sekitar area Masjid Islamic Center - Pindah sekitar area Teluk Lerong - Pindah di Taman Samarinda
Advokasi kolektif ke Satpol PP dan DPRD	2 orang (Bapak SR dan Bapak AG)	- Tidak ada kepastian hasil advokasi
Mengamankan aset dagangan	1 orang (Ibu SI)	- Mencoba mengambil gerobak yang telah disita aparat
Menunggu relokasi resmi	1 orang (Bapak AS)	- Menunggu kepastian informasi lanjutan dari pemerintah
Pasrah dan berhenti sementara	1 orang (Bapak SN)	- Menunggu situasi membaik/tenang

Sumber: Data peneliti, 2025

Mayoritas pedagang sebanyak 7 orang pindah ke titik alternatif seperti sekitar Masjid Islamic Center, Teluk Lerong, dan Taman Samarinda demi menjaga kontinuitas usaha. Strategi 2 orang lainnya meliputi pengaturan waktu berdagang di luar jam operasional aparat untuk menghindari razia, serta 2 orang informan melakukan upaya advokasi kolektif ke Satpol PP dan DPRD yang saat itu belum membuahkan kepastian solusi. Di sisi lain, sebagian pedagang

merespons secara defensif dengan berfokus pada pengamanan aset dagangan (menebus gerobak yang disita), menunggu relokasi resmi pemerintah, atau memilih pasrah dan berhenti berjualan sementara waktu.

1.3 Peran Komunitas PKL dalam Advokasi

Peran komunitas atau organisasi PKL dalam melakukan advokasi pasca sterilisasi di Tepian Mahakam dinilai belum efektif, tidak signifikan, dan tidak berkelanjutan. Mayoritas pedagang 9 dari 13 informan tidak mengetahui atau tidak merasakan keberadaan komunitas aktif yang dapat mewujudkan aspirasi mereka. Sementara itu, sebagian kecil pedagang yang pernah mengetahui atau tergabung dalam organisasi seperti IPTM mengutarakan kekecewaan (kurang puas/tidak puas) karena program bantuan atau pendampingan yang diberikan dahulu sangat terbatas, selektif, dan saat ini organisasinya telah bubar.

Lemahnya kelembagaan kolektif ini membuat proses advokasi berjalan secara individual, serta memperlemah posisi tawar dan kapasitas perlindungan bagi PKL dalam menghadapi kebijakan pemerintah.

2. Dampak Sosial Sterilisasi Terhadap PKL

2.1 Hubungan Antar PKL

Kebijakan sterilisasi di Tepian Mahakam secara signifikan mengubah dinamika sosial antar PKL yang semula harmonis dan solid menjadi individualis, bahkan kompetitif akibat hilangnya ruang komunal fisik untuk berinteraksi. Perubahan ini terbagi ke dalam empat respons.

Tabel 2.1 Perbandingan Hubungan Sosial Antar Pedagang Pra dan Pasca Penertiban

Hubungan Sosial Pra Penertiban	Hubungan Sosial Pasca Penertiban	Informan	Keterangan
Solid, kompak, seperti keluarga	Renggang dan terpencar	5 orang (Bapak O, Bapak SR, Bapak AG, Bapak DY, dan Bapak AP)	- Sebelum penertiban hubungan sangat akrab dan penuh solidaritas - Setelah berpencar, intensitas interaksi menurun dan menyempit
Akrab dan harmonis	Muncul individualisasi dan gesekan	3 orang (Ibu JH, Ibu KS, dan Ibu SI)	- Relasi yang sebelumnya hangat berubah menjadi lebih tertutup - Persaingan lokasi memicu ketegangan
Kompak dan saling mendukung	Renggang tetapi menjaga komunikasi	3 orang (Ibu SH, Bapak AS, dan Bapak SN)	- Solidaritas emosional masih ada, namun interaksi fisik berkurang karena relokasi

Harmonis dan stabil secara sosial	Melemah akibat tekanan ekonomi dan bubarnya komunitas	2 orang (Bapak MSF, dan Bapak H)	- Hilangnya wadah kolektif dan tekanan pasca penertiban mempengaruhi kohesi sosial antar pedagang.
-----------------------------------	---	----------------------------------	--

Sumber: Data peneliti, 2025

Sebagian pedagang mengalami penyempitan lingkaran pertemanan karena lokasi usaha yang saling terpencar, sebagian lainnya terlibat persaingan dalam memperebutkan ruang baru yang strategis, sementara kelompok lain tetap berupaya menjaga ikatan emosional senasib melalui komunikasi terbatas. Di sisi lain, tekanan ekonomi yang berat serta bubarnya wadah kolektif tanpa adanya pendampingan konkret dari pemerintah turut memperparah beban mental pedagang, yang pada akhirnya melemahkan solidaritas struktural dan jaringan sosial yang telah lama terbangun di antara mereka.

2.2 Pengelompokan Sosial

Kebijakan sterilisasi di Tepian Mahakam secara laten telah merekonstruksi struktur sosial PKL dari horizontal egaliter menjadi stratifikasi sosial vertikal baru akibat ketimpangan akses informasi, modal, dan jaringan. Perubahan struktural ini terbagi ke dalam empat respons. Mayoritas pedagang berjumlah 6 informan merasakan pergeseran dari kesetaraan menjadi polarisasi kelompok beruntung dan kelompok tersingkir akibat perbedaan akses lokasi baru. Sebanyak 2 informan lain mendapati perbedaan ekonomi dan senioritas menjadi lebih nyata karena pedagang bermodal besar lebih mudah beradaptasi. Kelompok lain berjumlah 3 informan melihat munculnya kelompok berbasis koneksi karena kedekatan tokoh setempat mempercepat perolehan informasi penertiban. Sementara sisanya 2 informan merasakan kecemburuan sosial akibat ketidakmerataan distribusi bantuan dan relokasi.

Pada akhirnya, intervensi tata ruang yang kurang sensitif terhadap keadilan sosial memicu polarisasi antara kelompok yang adaptif dominan karena memiliki akses dengan kelompok rentan yang tersingkir, sehingga menciptakan ketimpangan sosial baru di kalangan pedagang.

2.3 Hubungan Dengan Masyarakat

Hubungan sosial antara PKL dan masyarakat umumnya berlangsung positif, dan berbasis solidaritas yang terbangun melalui interaksi ekonomi personal selama bertahun-tahun. Dukungan masyarakat tercermin dari adanya simpati, kesediaan membeli di tempat baru, hingga bantuan promosi, yang memperkuat legitimasi sosial PKL di kawasan tersebut. Meskipun demikian, kebijakan sterilisasi tetap mempengaruhi hubungan ini ke dalam beberapa respons. Sebagian besar pedagang merasakan hubungan tetap terjaga erat, sebagian lain berjumlah 4 orang informan mengalami penurunan intensitas pertemuan dan kerenggangan kedekatan sosial akibat terbatasnya ruang fisik baru. Sebanyak 1 informan lain merasakan hubungan yang bersifat campuran akibat perbedaan persepsi masyarakat yang pro terhadap penyediaan kuliner murah dan yang kontra terhadap masalah kemacetan serta kebersihan.

2.4 Pengaruh Kelompok Eksternal

Pengaruh kelompok eksternal terhadap PKL di Kawasan Tepian Mahakam bersifat kompleks dan beragam, dimana mayoritas pedagang berjumlah 5 informan membayar iuran rutin kepada kelompok pengelola informal demi mendapatkan jaminan keamanan, kebersihan, dan akses informasi. Di sisi lain, ketertiban kawasan ini juga dipengaruhi oleh keberadaan pengamen, anak jalanan yang meresahkan pembeli, serta maraknya praktik parkir liar bertarif tinggi yang minim penertiban oleh pemerintah. Meskipun demikian, tekanan ini tidak dirasakan seragam karena sebagian pedagang berjumlah 4 informan mengaku tetap merasa aman tanpa mengalami pemalakan langsung, sementara 1 orang informan menekankan bahwa peran komunitas sangat krusial sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan kolektif guna menjaga stabilitas usaha sesama PKL dari gangguan luar tersebut.

2.5 Perubahan Habitus (Pola Kebiasaan)

Kebijakan sterilisasi kawasan Tepian Mahakam secara signifikan mengubah habitus dan kebiasaan PKL dari aktivitas yang semula stabil dan teratur menjadi kondisi yang tidak menentu serta penuh risiko ekonomi dan psikologis. Sebelum sterilisasi, pedagang memiliki jam kerja teratur, pendapatan cukup, dukungan keluarga, serta kondisi emosional yang santai dan optimis. Namun pasca sterilisasi, perubahan ini terbagi dalam beberapa dimensi. Pertama, penurunan pendapatan yang drastis memicu peningkatan stres dan gangguan kesehatan bagi sebagian pedagang berjumlah 3 orang. Kedua, mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga hingga memicu utang sebanyak 2 orang. Ketiga, memaksa perpanjangan jam kerja hingga kurang tidur demi mengejar pemasukan di lokasi baru yang sepi sebanyak 1 orang. Keempat, memicu kecemasan mendalam akan penggusuran kembali sebanyak 2 informan. Meskipun ada 1 orang pedagang yang menjual aset produktifnya, dan sebanyak 3 informan pedagang memilih bersikap adaptif menganggapnya sebagai hal biasa. Sebanyak 1 informan lain merasa tekanan yang berat ini mendorong penyesuaian spiritual melalui peningkatan religiusitas dan refleksi diri sebagai strategi bertahan dalam menghadapi lingkungan sosial baru yang lebih restriktif.

3. Dampak Ekonomi Sterilisasi Terhadap PKL

3.1 Kondisi Ekonomi Pra Penertiban

Sebelum dikeluarkannya Surat Sekretaris Daerah terkait penutupan usaha, aktivitas ekonomi sekitar 130 PKL di Kawasan Tepian Mahakam mencerminkan pemanfaatan ruang publik yang bernilai strategis sebagai sumber utama penghidupan rumah tangga mereka. Kondisi ekonomi pra penertiban para pedagang terbagi ke dalam dua karakteristik umum, yaitu sebanyak 5 informan sebagai kelompok ekonomi relatif stabil dan berkembang yang menikmati kepastian pendapatan rutin harian dari ramainya pengunjung

hingga mampu menabung dan merencanakan ekspansi usaha, serta kelompok ekonomi cukup dan bertahan sebanyak 8 informan yang meskipun pendapatannya fluktuatif pas-pasan, namun akses pasarnya masih memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga sehari-hari. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa sebelum adanya kebijakan sterilisasi, keramaian lokasi Tepian Mahakam memberikan kontribusi nyata yang produktif dan berkelanjutan bagi ketahanan ekonomi sektor informal di Kota Samarinda.

3.2 Perubahan Tingkat Penghasilan Pasca Sterilisasi

Kebijakan sterilisasi di Kawasan Tepian Mahakam menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan berupa penurunan pendapatan bagi seluruh pedagang akibat kehilangan lokasi strategis dan berkurangnya pelanggan, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang kian rentan.

Tabel 3.1 Perubahan Pada Tingkat Penghasilan Pasca Sterilisasi

Kategori Perubahan Penghasilan	Gambaran Umum Perubahan	Informan	Keterangan
Penurunan drastis	Pendapatan turun tajam, sebagian sempat nol atau kurang dari separuh penghasilan sebelumnya	6 orang (Ibu SI, Ibu KS, Bapak DY, Bapak MSF, Ibu SH, dan Bapak SN)	- lokasi strategis menyebabkan pemasukan tidak stabil - Kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan tidak dapat menabung
Penurunan namun masih bertahan	Pendapatan menurun tetapi tetap ada pemasukan dan mampu bertahan	7 orang (Bapak AS, Bapak AP, Bapak AG, Ibu JH, Bapak SR, Bapak O, dan Bapak H)	- Penghasilan berkurang pasca sterilisasi - Pedagang masih beradaptasi dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi meski dalam kondisi terbatas

Sumber: Data peneliti, 2025

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan penghasilan ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni kelompok yang mengalami penurunan drastis berjumlah 6 informan, di mana pendapatan harian mereka merosot tajam dari kisaran Rp250.000 – Rp400.000 menjadi Rp0 – Rp150.000 hingga memicu kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan ketidakmampuan untuk menabung. Sementara itu, kelompok lainnya berjumlah 7 informan tetap mengalami penurunan penghasilan yang memotong kapasitas ekonomi rumah tangga

mereka seperti dari nominal Rp500.000 – Rp600.000 menjadi sekitar Rp150.000 – Rp300.000 per hari, namun mereka masih mampu beradaptasi dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi harian meskipun dalam kondisi yang serba tertentu dan terbatas.

3.3 Adaptasi Usaha

Adaptasi usaha PKL pasca sterilisasi masih didominasi oleh keterbatasan pengetahuan serta sumber daya, di mana mayoritas pedagang berada dalam posisi bertahan konvensional tanpa adanya inovasi produk yang signifikan. Kondisi literasi kewirausahaan para pedagang ini terbagi ke dalam empat kategori respons. Sebagian besar pedagang berjumlah 8 dari 13 informan tidak memiliki pengetahuan mengenai diversifikasi usaha karena belum memahami konsep pengembangan produk. Sebanyak 2 informan lain sudah memahami urgensi diversifikasi namun menghadapi hambatan finansial berupa keterbatasan modal awal. Sebanyak 2 informan lain juga memahami konsep tersebut tetapi terkendala faktor eksternal seperti tanggung jawab mengurus keluarga, masalah kesehatan, serta keterbatasan waktu. Sementara hanya ada 1 informan pedagang yang memiliki literasi kewirausahaan lebih tinggi dan secara aktif melakukan inovasi produk dengan menyesuaikan jenis dagangan terhadap tren pasar sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga daya saing usahanya.

3.4 Kemampuan Kepemilikan Simpanan dan Aset

Ketidakstabilan pendapatan pasca sterilisasi berdampak buruk terhadap struktur kekayaan dan keamanan finansial rumah tangga PKL, sehingga menurunkan kemampuan mereka dalam mempertahankan simpanan serta aset. Kondisi kerentanan finansial para pedagang ini terbagi ke dalam beberapa bentuk respons. Sebanyak 1 pedagang terpaksa menjual aset produktif utama (motor satu-satunya) demi memenuhi kebutuhan dasar harian. Sebanyak 3 pedagang mengalami pengurangan seluruh tabungan serta harus berutang ke keluarga atau koperasi sebagai modal usaha. Sebanyak 3 pedagang lainnya berada dalam kondisi paling berat karena sejak awal tidak memiliki aset maupun cadangan finansial sebagai bantalan ekonomi saat krisis. Sementara sebanyak 5 pedagang mampu mempertahankan aset fisik mereka dengan cara memanfaatkannya untuk pekerjaan sampingan seperti ojek online. Meskipun terdapat variasi strategi individu, 1 informan selaku perwakilan komunitas menegaskan secara kolektif bahwa mayoritas PKL terdampak sangat serius hingga terpaksa melepas barang berharga mereka sebagai langkah terakhir untuk bertahan hidup.

3.5 Mata Pencaharian Alternatif

Mayoritas PKL di Kawasan Tepian Mahakam tidak memiliki sumber mata pencaharian alternatif dan sepenuhnya bergantung pada aktivitas berdagang sebagai tumpuan ekonomi utama keluarganya, sehingga kebijakan sterilisasi berdampak langsung terhadap kerentanan stabilitas hidup mereka. Ragam strategi adaptasi pedagang dalam menyikapi krisis ini terbagi menjadi

beberapa kelompok. Sebanyak 6 informan pasrah mengandalkan dagangan tanpa penyangga pendapatan lain. Sebanyak 1 informan bahkan kehilangan kepastian kerja pasca sterilisasi dan terpaksa bergantung pada bantuan. Sebanyak 2 informan memilih fleksibel dengan menambah pekerjaan sampingan sebagai ojek online meskipun harus mengorbankan waktu istirahat. Sebanyak 2 informan mengubah strategi usaha melalui relokasi mandiri atau keterlibatan suami sebagai juru parkir. Sementara hanya 1 informan yang memiliki resiliensi lebih baik karena sudah mendiversifikasi pendapatan sejak awal melalui usaha bakso, paguyuban reog, dan berkebun singkong. Realitas keterbatasan ini diperkuat oleh 1 informan perwakilan komunitas IPTM yang menegaskan secara kolektif bahwa ketergantungan yang sangat tinggi pada Tepian Mahakam membuat opsi pekerjaan alternatif yang tersedia di luar sektor perdagangan sangat terbatas dan tidak mampu menggantikan penghasilan mereka sebelumnya.

3.6 Strategi Bertahan Hidup Ekonomi Terdampak

Strategi bertahan PKL dalam menghadapi ekonomi pasca sterilisasi bersifat adaptif namun terbatas pada fase bertahan hidup, bukan untuk mengembangkan usaha. Bentuk penyesuaian ekonomi dan spasial para pedagang ini terbagi ke dalam beberapa pola tindakan. Sebanyak 4 informan menerapkan adaptasi spasial melalui relokasi mandiri dan jualan keliling demi mempertahankan akses pasar meskipun harus menanggung risiko sepinya pembeli. Sebanyak 3 informan memilih fleksibilitas kerja dengan mengambil alternatif pekerjaan tambahan seperti ojek online, buruh, serabutan, berkebun, atau paguyuban seni sebagai penyangga pendapatan. Sebanyak 3 informan melakukan penyesuaian internal rumah tangga melalui penghematan biaya konsumsi serta pengurangan jam operasional berjualan. Sebanyak 3 informan mengandalkan kekuatan modal sosial berupa dukungan keluarga, menumpang hidup, atau mengajukan pinjaman koperasi. Sementara sebanyak 2 informan berada dalam tingkat kerentanan tertinggi hingga terpaksa melakukan penjualan aset produktif (motor) serta mengupayakan advokasi kolektif guna mencari bantuan ke berbagai pihak.

4. Implementasi Kebijakan dan Perspektif Aparat

Hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda menunjukkan bahwa aparat memandang kebijakan sterilisasi sebagai kewajiban yang harus dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Aparat Satpol PP memaknai kebijakan sterilisasi Tepian Mahakam sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan ruang publik. Kebijakan ini didasarkan pada surat Sekretaris Daerah tentang penutupan aktivitas usaha di sepanjang kawasan tersebut, yang dipicu oleh maraknya jukir liar, pungutan liar, dan potensi premanisme.

Proses penertiban dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi, peringatan, dan tindakan administratif, sehingga tetap menjaga legitimasi hukum serta

akuntabilitas dalam penegakan ketertiban ruang publik. Secara umum, penertiban dilakukan secara langsung sesuai SOP melalui sosialisasi, pembongkaran dan pengosongan area, yang berdampak pada hilangnya ruang usaha PKL secara cepat.

5. Solusi, Hambatan, dan Efektivitas Kebijakan

5.1 Solusi yang Ditawarkan Pemerintah

Solusi pasca sterilisasi yang ditawarkan pemerintah memicu kesenjangan persepsi yang tajam dengan para PKL, di mana kebijakan aparat cenderung berorientasi pada kepatuhan regulatif administratif spasial, sementara pedagang menitikberatkan pada keberlanjutan ekonomi riil. Dari sudut pandang aparat, pengalihan lokasi berdagang (seperti ke Jl. Gunung Semeru), pelaksanaan sosialisasi sesuai SOP, serta penyediaan tempat alternatif berbayar yang dikelola swasta/tokoh pemuda di Jl. Anggi merupakan langkah penataan kota yang tertib, realistis, dan humanis untuk memulihkan fungsi estetika kawasan sekaligus memberantas praktik juru parkir liar, pungli, serta premanisme.

5.2 Evaluasi Efektivitas Solusi Menurut PKL

Evaluasi dari sudut pandang PKL menunjukkan bahwa solusi relokasi pemerintah dinilai belum efektif dan sepihak karena lebih mengutamakan ketertiban ruang ketimbang menjamin keberlanjutan ekonomi sektor informal. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh pengalihan ke lokasi baru yang sepi pembeli sehingga menurunkan pendapatan harian secara drastis, serta munculnya beban operasional baru (seperti biaya sewa dan listrik) yang memperlemah daya tahan usaha pedagang bermodal kecil. Rendahnya efektivitas kebijakan ini juga berakar dari minimnya pelibatan PKL dalam dialog perumusan solusi, sehingga kebijakan yang diterapkan terkesan kurang kontekstual, hanya efektif menata kawasan, namun sangat terbatas dalam melindungi kesejahteraan hidup pedagang.

5.3 Hambatan Implementasi Solusi

Hambatan implementasi solusi pasca sterilisasi bersumber dari ketidaksesuaian desain kebijakan pemerintah dengan realitas ekonomi, sosial, dan struktural para PKL, sehingga kebijakan penataan kota ini memberikan dampak ganda yang positif bagi estetika kota namun mayoritas negatif bagi pedagang. Secara ekonomi, hambatan utama berupa rendahnya daya tarik pasar di lokasi relokasi yang sepi pengunjung serta munculnya beban biaya operasional tambahan (sewa lapak dan listrik) yang memperbesar risiko kerugian bagi pedagang bermodal kecil. Secara sosial dan struktural, implementasi diperparah oleh minimnya partisipasi dan ruang aspirasi bagi PKL akibat sosialisasi yang bersifat sepihak, serta keterbatasan kapasitas adaptasi individu pedagang yang dipengaruhi faktor usia, kesehatan, modal, dan keterampilan. Akibatnya, kebijakan ini tidak berjalan optimal dan justru memicu pelemahan relasi sosial, penurunan pendapatan drastis, serta

ketimpangan akses yang mengancam keberlanjutan penghidupan sektor informal tersebut.

Kesimpulan

Kebijakan sterilisasi Kawasan Tepian Mahakam menimbulkan dampak ganda yang signifikan para PKL. Secara sosial, kebijakan ini memicu penurunan interaksi komunal, pelemahan peran sosial, serta perubahan habitus berdagang menjadi lebih tidak menentu dan defensif terhadap risiko penertiban di bawah struktur baru yang restriktif. Kondisi ini bahkan menciptakan ketimpangan sosial baru antara kelompok pedagang yang memiliki akses terhadap informasi dan lokasi alternatif dengan kelompok rentan yang tidak memiliki akses. Sementara dari sisi ekonomi, hilangnya lokasi strategis dan anjaknya jumlah pembeli mendegradasi pendapatan harian PKL secara tajam, sehingga memaksa mereka melakukan penghematan ekstrim, menguras tabungan, hingga menjual aset produktif demi bertahan hidup, sekaligus membatasi peluang mereka untuk berkembang atau menemukan sumber penghasilan alternatif yang berkelanjutan.

Saran

- a. Pemerintah Daerah Kota Samarinda disarankan menyusun kebijakan penataan yang menjamin keberlanjutan ekonomi PKL melalui penyediaan lokasi strategis dan terjangkau.
- b. Pendekatan persuasif dan dialog dua arah oleh aparat pelaksana guna menekan resistensi sosial.
- c. PKL perlu memperkuat komunitas sebagai wadah komunikasi dan advokasi.
- d. Masyarakat dan pemangku kepentingan kawasan diharapkan mendukung penataan kawasan yang inklusif bagi sektor informal.
- e. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan lokasi dan informan.
- f. Melakukan penelitian metode kuantitatif atau campuran (*mixed method*) demi mengukur kesejahteraan secara objektif.
- g. Melakukan studi komparatif atau jangka panjang (*longitudinal*) untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ade Heryana. (2020). Kelas Sosial Dan Inequality. *Kelas Sosial Dan Inequality*, June, 9. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12818.89289>
- Affifah, Farrah. P. (2021). Apa Itu Hubungan Sosial? Simak Penjelasannya Lengkap dengan Bentuk-bentuknya. *Tribunnews*. <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/09/02/apa-itu-hubungan-sosial-simak-penjasannya-lengkap-dengan-bentuk-bentuknya?page=all> Diakses pada 27 Juni 2023
- Aotama, R. C., & Klavert, D. R. H. (2021). Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon. *SOCIA: Jurnal Ilmu-*

- Ilmu Sosial*, 18(1), 1–9. <https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.37719>
- Beni, S., & Atlantika, Y. N. (2022). *Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Bengkayang. Control of Food Traders in Bengkayang Market*. 12(1).
- Dwi P., Rahmat. (2015). Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Penambangan Batubara Ilegal Di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. Jurusan Sosiologi, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik : Universitas Sriwijaya
- Fardani, Andi. (2012). Dampak Sosial Keberadaan Pt Vale Indonesia Tbk Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur). Universitas Hasanuddin: Jurusan Sosiologi FISIP.
- Fayyadi, G. F. al, & Nefianto, T. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. *Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro*, 35.
- Firman, A. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Berbasis Komunitas. *Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM*, 7(1), 1–15.
- Haki, U., & Komarudin, M. (2022). Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Stadion Maulana Yusuf Ciceri Kota Serang. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 245–255. <https://doi.org/10.46306/vls.v2i1.96>
- Hariyani, T. (2021). Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Mempertahankan Usaha Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi pada PKL di Lapangan Desa Karangrejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri). *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 7(1), 147–164. <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/495>
- Kusnadi. (2000). Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate): Prinsip, Prosedur dan Metode. Universitas Brawijaya Malang.
- Langgulong, Hasan. (1980) Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam. Bandung: Al- Ma'arif.
- Mardiyah, U., Purwanti, N., & Sarapayari, F. Y. (2021). *Penggunaan Ruang Publik Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong (Studi Pada Area Toko Thio di Kelurahan Remu Utara)*. 7(1).
- Murlianti, S., Nanang, M., Purwaningsih, Sukapti, Qamara Dewi Hakim, A., Nurmanina, A., ... & Basri, H. (2025). From Communal Fields to Corporate Frontiers: Extractive Agribusiness and the Cultural Displacement of the Dayak Kenyah. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 665, p. 01035). EDP Sciences.
- Murlianti, S., Nanang, M., & Rahman, A. (2022). Evaluation of the Welfare of Piece Workers at Oil Palm Plantations in West Kutai, East Kalimantan. *Indonesian Journal of Community Services Cel*, 1(3), 198-208.
- Murlianti, S., Purwaningsih, P., Hakim, A. Q. D., Sriani, H., Khusna, N. A., & Tabilangi, C. (2024). Social Reconfiguration and Marginalization of

- Farmers in Transmigrant Village in the Context of Coal Industrialization in Tenggara Seberang, East Kalimantan. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 16(2), 245-258.
- Murlianti, S., & Mulyani, R. A. (2026). Policies Lost in the Field: A Critical Study of Communication, Resources, and Bureaucratic Structure in the Stunting Program. *International Journal of Scientific Research Studies*, 3(2), 31-38. <https://doi.org/10.58806/ijrsr.2026.v3i2n02>
- OCBC NISP. (2021). Pengertian Tabungan, Jenis, Manfaat, dan 8 Tips Menabung. <https://www.ocbcnisp.com/id/Article/2021/03/15/pengertian-tabungan> diakses pada 27 Juni 2023
- Pratiwi, M. P., Sari, A. R., Praditya, S., Manajemen, S., & Bisnis, F. (2022). *Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Malioboro Terhadap Pedagang Kaki Lima. Khazanah : Jurnal Mahasiswa*. 14(2), 56–63.
- Qothrunnada, Kholida. (2022). Apa Itu Investasi? Ini Pengertian, Jenis, dan Contohnya. *detikFinance*. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5983819/apa-itu-investasi-ini-pengertian-jenis-dan-contohnya/amp> diakses pada 3 Juli 2023
- Sabat, Olivia. (2021). Struktur Sosial: Definisi Para Ahli, Ciri-ciri, dan Unsur Pembentuknya. *detikEdu*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5816660/struktur-sosial-definisi-para-ahli-ciri-ciri-dan-unsur-pembentuknya> diakses pada 27 Juni 2023
- Saputra, R., & Gunawan, E. (2019). Analisis Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Di Kota Sigli Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 4(2), 95–102.
- Septian, E. (2022). Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(3). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/9190%0A> <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/download/9190/5504>
- Sethuraman, S. V. (1991). Sektor Informal di Negara Sedang Berkembang. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. C. Manning and T. N. Effendi: Jakarta.